



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

**Jl. P Mandurorejo No. 84 A Kajen 51161
Telp. (0285) 382 002 Fax (0285) 382 001**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekalongan, 18 Juli 2025
Sekretaris

Bambang Yasmanto, SE, M.Si
NIP* 19691202 199703 1 00





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggungjawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jl. Mandurorejo No. 84 A – KAJEN 51161

Telp. (0285) 382002 Fax. (0285) 382001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kajen, 18 Juli 2025
Sekretaris

BAMBANG YUSMANTO, SE, M.Si
NIP. 19691202 199703 1 003



**RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode I Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.795.555.962 atau mencapai 62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.475.110.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 973.954.408 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 238.611.325 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 735.343.083 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 4.962.449.017 dan Rp 3.988.494.600

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.958.615.168 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 2.958.615.168 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 2.396.262.768

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Semester I tahun 2025 pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 6.675.969.119 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 2.396.262.768 kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.493.198.199 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 3.493.198.199.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KOMISI

**LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**

PEMILIHAN UMUM



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025		% thd Ang	JUNI
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	391,542,400	0.00	34,293,391
JUMLAH PENDAPATAN		-	391,542,400	0.00	34,293,391
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3,074,015,000	1,551,805,085	50	1,485,119,492
Belanja Barang	B.4	1,376,049,000	1,243,728,877	90	60,899,704,736
Belanja Modal	B.5	25,046,000	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		4,475,110,000	2,795,533,962	62	62,384,824,228



NERACA

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		214,570,125	214,570,125
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	24,000,000	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	41,200	5,897,189,761
Persediaan	C.3	-	-
Jumlah Aset Lancar		238,611,325	6,111,759,886
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	2,541,512,550	2,370,702,550
Gedung dan Bangunan	C.5	97,718,000	97,718,000
Peralatan dan Mesin Belum Register	C.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(1,907,087,467)	(1,907,087,467)
Aset Tetap lainnya	C.8	3,200,000	3,200,000
Jumlah Aset Tetap		735,343,083	564,533,083
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	202,231,500	202,231,500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(202,231,500)	(202,231,500)
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET		973,954,408	6,676,292,969
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	4,920,968,517	323,850
Uang Muka dari KPPN	C.12	24,000,000	
Utang yang Belum Ditagihkan		17,439,300	
Utang Jangka Pendek Lainnya		41,200	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4,962,449,017	323,850



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.1	1,697,446,991	1,611,657,123
Beban Persediaan	D.2	-	4,660,708,660
Beban Barang dan Jasa	D.3	696,719,477	57,140,746,335
Beban Pemeliharaan	D.4	50,274,000	36,889,000
Beban Perjalanan Dinas	D.5	514,174,700	3,770,665,100
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat			
Beban Penyusutan dan Amortisasai	D.6	-	101,156,033
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,958,615,168)	(67,287,528,860)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.7		-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
JUMLAH PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		170,810,000	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		170,810,000	-
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
Beban penyesuaian Nilai Persediaan		-	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang		-	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		562,352,400	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2,396,262,768)	(67,287,528,860)

KOMISI

**LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS**

PEMILIHAN

LIHAN

UMUM



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	6,675,969,119	5,590,682,188
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,396,262,768)	(67,287,528,860)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR		(4,775,002,761)	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(3,493,198,199)	74,221,846,595
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(10,664,463,728)	6,934,317,735
EKUITAS AKHIR	E.5	(3,988,494,609)	12,524,999,923



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

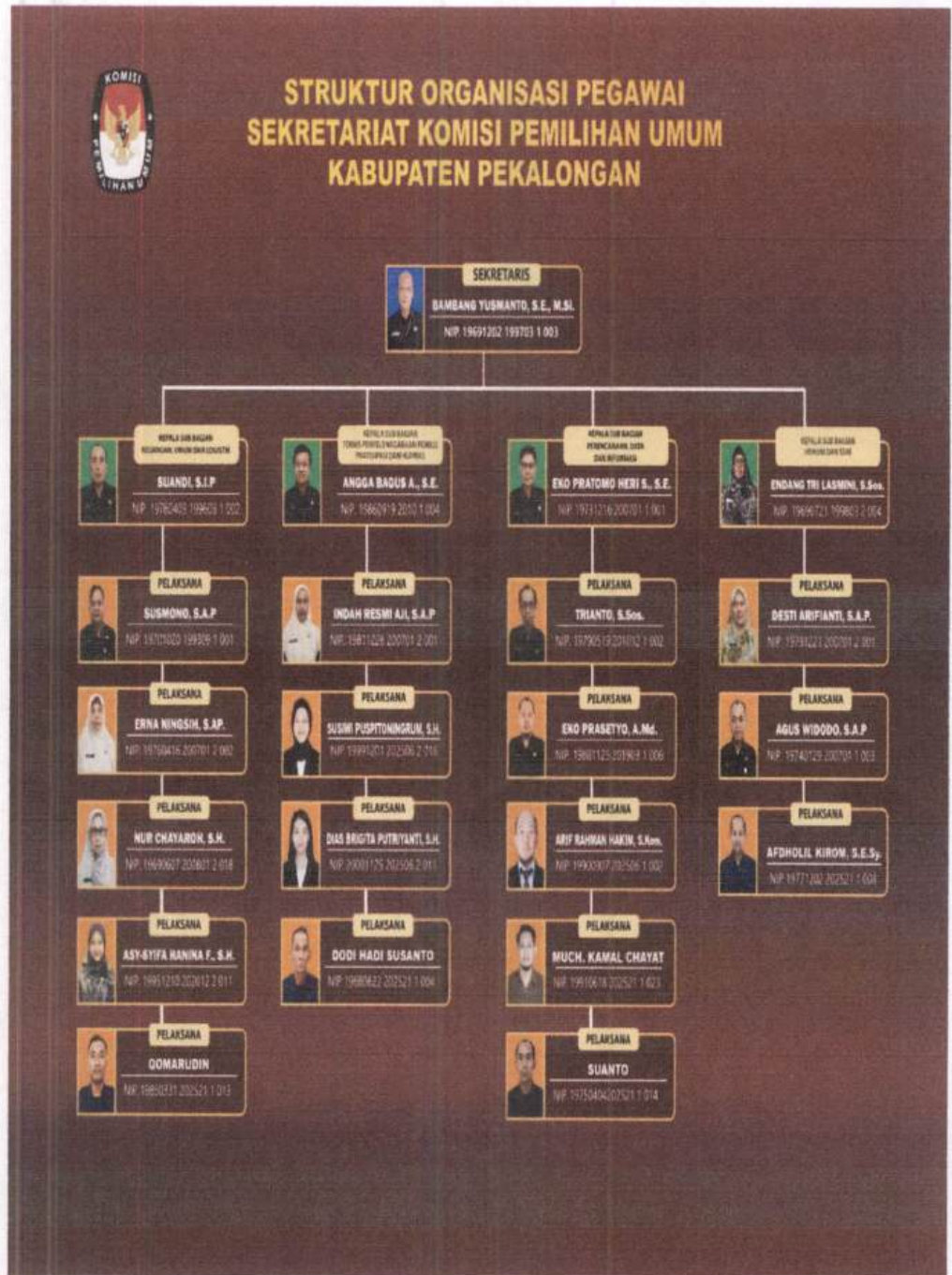
*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatnya Partisipasi dalam Pemilihan Tahun 2025, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

1. Visi Komisi Pemilihan Umum
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
2. Misi Komisi Pemilihan Umum
 - a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
 - b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
 - d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Utang kepada Pihak Ketiga Rp 4.920.968.517 dengan

Rincian Sebagai Berikut :

- a. 145.641.906 : Gaji Induk PNS dan P3K Serta Penghasilan induk KPU serta PPNPN yang telah di Lunas Bayarkan.
- b. 323.850 : Tagihan Air bulan Desember yang di bayarkan di bulan januari 2025.
- c. 4.775.002.761 ; Pengembalian sisa Dana Hibah Pilkada ke Pemerintah Kab.Pekalongan sesuai Bukti SP4HL Nomor : 00049A, TANGGAL 10 April 2025.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2025 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2023 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
	Penerimaan Dalam Negeri	-	-
	a. Penerimaan Perpajakan		
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	Pendapatan Lain-lain	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	-	-
B	Belanja		
	Belanja Pegawai	3,074,015,000	
	Belanja Barang	1,376,049,000	
	Belanja Modal	25,046,000	0
	Pembayaran Bunga Utang		

Realisasi
Pendapatan
Rp 0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Realisasi Belanja
Negara
Rp
2.795.533.962

B.2 Belanja

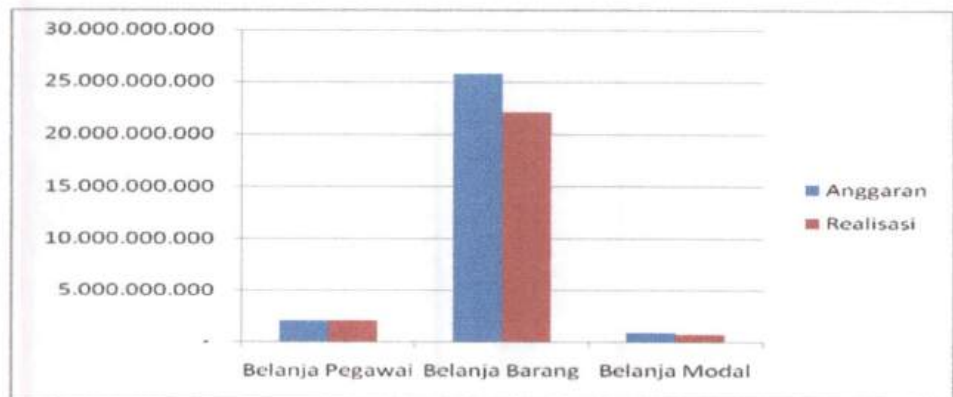
Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2025

adalah sebesar Rp 2.795.533.962 atau 62.00% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.475.110.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,074,015,000	1,551,805,085	50
Belanja Barang	1,376,049,000	1,243,728,877	90
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	25,046,000	-	-
Total Belanja Kotor	4,475,110,000	2,795,533,962	62
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	4,475,110,000	2,795,533,962	62

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja Semester I TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 62.47% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2025

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2025	Reaisasil 30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Rupiah Murni dan Pinjaman dari Hibah			
Belanja Pegawai	3,074,015,000	1,551,805,085	50
Belanja Barang	1,376,049,000	1,243,728,877	90
Belanja Modal	25,046,000	-	-
Jumlah	4,475,110,000	2,795,533,962	62

Belanja Pegawai
Rp
2.795.533.962

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.795.533.962 dan Rp 62.384.824.228 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	Real 30 Juni 2025	Real 30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		1,421,438,708	
Jumlah Belanja Kotor	0	1,421,438,708	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	0	1,421,438,708	

Belanja Barang

B.4 Belanja Barang

Rp

1.376.049.000

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.243.728.877 Rp 60.899.704.736.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	Real 30 JUNI 2025	Real 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	319,338,700	(100.00)
Belanja Barang Non Operasional	451,183,700	1,852,810,800	(75.65)
Belanja Jasa	-	84,780,027	(100.00)

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-

Belanja Modal

Rp 0,-

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	Real 30 JUNI 2025	Real 31 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0%
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	0%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Rp 24.000.000,-

C.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 24.000.000,- dan

Rp 0'-

yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Jun-25	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	-
Jumlah	24,000,000	-

Persediaan

Rp 0,-

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	30-Jun-25	TH 2024
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Peralatan dan

Mesin

Rp 2.541.512.550,-

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp 2.541.512.550,- dan Rp 2.370.702.550,-

Gedung dan

Bangunan

Rp 97.718.000,-

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp 97.718.000,- dan Rp 97.718.000,-. Tidak ada mutasi nilai Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Gedung berupa gudang yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Sertifikat Tanah NIB : 11.31.08.17.01582.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp 1.907.087.467,-

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 1.907.087.467,- dan Rp 1.907.087.467,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,541,512,550		
2	Gedung dan Bangunan	97,718,000		
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		
4	Aset Tetap Lainnya	3,200,000		
Akumulasi Penyusutan		2,642,430,550		0

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya*

Rp 202.231.500,-

*Uang Muka dari
KPPN*

Rp 24.000.000,-

*Ekuitas
Rp 3.988.494.609,-*

C.6 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 202.231.500,- dan Rp 202.231.500,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.7 Uang Muka Dari KPPN

Saldo uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 24.000.000,- dan Rp 0,-. Akun ini merupakan penyeimbang kas di Bendahara Pengeluaran.

C.8 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.988.494.609,- dan Rp 6.675.969.119,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pegawai **D.1 Beban Pegawai**

Rp 1.697.446.991,-

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.697.446.991,- dan Rp 1.611.657.123,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	30-Jun-25	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
			-
Jumlah	-	-	0.00%

D.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan Rp
0,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 4.660.746.335,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang
dan Jasa*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 2024

Rp
696.719.477,-

adalah masing-masing sebesar Rp 696.719.477,- dan Rp 57.140.746.335,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban
Pemeliharaan
Rp
50.274.000,-

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 50.274.000,- dan Rp 36.889.000,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp
514.174.700,-

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan dinas 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 514.174.700,- dan Rp 3.770.665.100,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melaksanakan misi KPU yaitu meningkatkan kualitas Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 0,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 101.156.033,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp 0,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas balance dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	30-Jun-25	2024	NAIK (TURUN) %
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan aset non lancar	0	0	0.00
Beban Pelepasan asetnon lancar	0	0	0.00
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	170,810,000		0
Pendapatan dari keg non operasional lainnya	170,810,000	0	0
Beban dari keg non operasional lainnya	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(170,810,000)	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp
6,675.969.119,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6.675.969.119,- dan Rp 5.590.682.188-.

Defisit LO

Rp

2.396.262.768,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 2.396.262.768,- dan Rp 67.287.528.860,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Aset Tetap Non

Revaluasi

Rp 0,-

E.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi pencatatan barang dari barang intrakomtable menjadi barang ekstrakomtable.

Transaksi Antar

Entitas

Rp

3,493,198,199,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar entitas merupakan selisih kenaikan/penurunan ekuitas dengan surplus/ defisit LO.

Ekuitas Akhir

Rp

3.988.494.609,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.988.494.609,- dan Rp 12.524.999.923,-

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan terjadi revisi DIPA sebagai berikut :

Daftar revisi DIPA

1. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2025 Tanggal 2 Desember 2024 (Dipa Awal)
2. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 21 Februari 2025 (Revisi 1)
3. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 27 Februari 2025 (Revisi 2)
4. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 12 Maret 2025 (Revisi 3)
5. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 21 Maret 2025 (Revisi 4)
6. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 15 April 2025 (Revisi 5)
7. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 7 April 2025 (Revisi 6)
8. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 23 Mei 2025 (Revisi 7)
9. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 20 Juni 2025 (Revisi 8)
10. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 26 Juni 2025 (Revisi 9)
11. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 8 Juli 2025 (Revisi 10)



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PEKALONGAN 657295

Tgl Data : 14/07/25 1:04 PM
Tgl Cetak : 14/07/25 7:18 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,475,110,000	2,795,533,962	(1,679,576,038)	62.47	80,877,027,000	62,384,824,228	(18,492,202,772)	77.14
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kabon, 14 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

BAMBANG YUSMANTO
NIP. 196912021997031003



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 1:04 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 7:18 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	41,200	5,897,189,761	(5,897,148,561)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	214,570,125	214,570,125	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	238,611,325	6,111,759,886	(5,873,148,561)	(96.10)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,541,512,550	2,370,702,550	170,810,000	7.21
Gedung dan Bangunan	97,718,000	97,718,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,200,000	3,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,907,087,467)	(1,907,087,467)	0	0.00
JUMLAH ASET TETAP	735,343,083	564,533,083	170,810,000	30.26
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	202,231,500	202,231,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(202,231,500)	(202,231,500)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	973,954,408	6,676,292,969	(5,702,338,561)	(85.41)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,920,968,517	323,850	4,920,644,667	1,519,420.93
Utang Yang Belum Ditagihkan	17,439,300	0	17,439,300	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	41,200	0	41,200	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,962,449,017	323,850	4,962,125,167	1,532,229.48
JUMLAH KEWAJIBAN	4,962,449,017	323,850	4,962,125,167	1,532,229.48
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(3,988,494,609)	6,675,969,119	(10,664,463,728)	(159.74)
JUMLAH EKUITAS	(3,988,494,609)	6,675,969,119	(10,664,463,728)	(159.74)
JUMLAH EKUITAS	(3,988,494,609)	6,675,969,119	(10,664,463,728)	(159.74)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	973,954,408	6,676,292,969	(5,702,338,561)	(85.41)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 1:04 PM
Tgl Cetak : 14/07/25 7:18 PM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Kejen, 14 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

BAMBANG YUSMANTO
NIP. 196912021997031003



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 1:04 PM
 Tgl Cetak : 14/07/25 7:18 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	41,200	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	214,570,125	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,541,512,550	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	97,718,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,200,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,887,543,862
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,543,605
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	202,231,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	202,231,500
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	145,641,906
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	323,850
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	4,775,002,761
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	17,439,300
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	41,200
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,673,346,962
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	391,542,400	0
0.0	391111	Ekuitas	0	6,675,969,119
0.0	391119	Koreksi Lainnya	4,775,002,761	0
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	4,775,002,761	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	391,542,400
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	170,810,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	497,640,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,916	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	37,611,850	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	10,205,548	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	30,780,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,361,733	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	24,767,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	42,590,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	14,940,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	536,326,280	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	39,748,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	565	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,974,880	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,288,572	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,620,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 1:04 PM
 Tgl Cetak : 14/07/25 7:18 PM
 Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,910,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	3,009,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2,160,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	439,504,827	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	20,941,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30,980,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,145,450	0
3.0	521211	Beban Bahan	347,464,400	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	163,199,900	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	20,945,913	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	616,064	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,929,950	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	16,050,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	89,446,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,653,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,621,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	98,676,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,150,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199,042,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	196,306,000	0
JUMLAH			15,983,436,465	15,983,436,465

Keterangan :

FINAL

Kejen, 14 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 SEKRETARIS

 BAMBANG YASMANTO
 NIP.196912021997031003



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 12:28 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 7:18 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,795,533,962
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	391,542,400	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	391,542,400
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	441,983,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,350	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	33,403,460	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,061,968	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27,360,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,244,272	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	22,015,680	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	42,590,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,280,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	477,211,280	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	26,499,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	360	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,649,920	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	859,048	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,080,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,607,120	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,009,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,440,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	439,504,827	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,031,400	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,380,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,145,450	0
3.0	521211	Belanja Bahan	347,464,400	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	163,199,900	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	20,945,913	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	616,064	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,879,950	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	16,050,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	88,061,600	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,307,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,716,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97,433,200	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,150,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	199,042,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	196,306,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 12:28 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 7:18 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			3,187,076,362	3,187,076,362

Keterangan :

FINAL



Kepala, 14 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

BAMBANG YASMANTO
196912021997031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 1:04 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 7:16 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	34,293,391	(34,293,391)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	34,293,391	(34,293,391)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	34,293,391	(34,293,391)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,697,446,991	1,611,657,123	85,789,868	5.323
Beban Persediaan	0	4,660,708,660	(4,660,708,660)	(100)
Beban Barang dan Jasa	696,719,477	57,140,746,335	(56,444,026,858)	(98.781)
Beban Pemeliharaan	50,274,000	36,889,000	13,385,000	36.285
Beban Perjalanan Dinas	514,174,700	3,770,665,100	(3,256,490,400)	(86.364)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 1:04 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 7:16 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	101,156,033	(101,156,033)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,958,615,168	67,321,822,251	(64,363,207,083)	(95.605)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,958,615,168)	(67,287,528,860)	64,328,913,692	(95.603)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	391,542,400	0	391,542,400	
Pendapatan Pelepasan Aset	391,542,400	0	391,542,400	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	170,810,000	0	170,810,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	170,810,000	0	170,810,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	562,352,400	0	562,352,400	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,396,262,768)	(67,287,528,860)	64,891,266,092	(96.439)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,396,262,768)	(67,287,528,860)	64,891,266,092	(96.439)

Keterangan :

FINAL

Kajen, 14 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



BAMBANG FUSMANTO

NIP. 196912021997031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 14/07/25 12:28 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 7:17 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_pcc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,675,969,119	5,590,682,188	1,085,286,931	19.41
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,396,262,768)	(67,287,528,860)	64,891,266,092	(96.44)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4,775,002,761)	0	(4,775,002,761)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	(4,775,002,761)	0	(4,775,002,761)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,493,198,199)	74,221,846,595	(77,715,044,794)	(104.71)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(10,664,463,728)	6,934,317,735	(17,598,781,463)	(253.79)
EKUITAS AKHIR	(3,988,494,609)	12,524,999,923	(16,513,494,532)	(131.84)

Keterangan :

FINAL

Pekalongan, 14 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 SEKRETARIS

 BAMBANG YUSMANTO
 NIP. 196912021997031003





**CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
PERIODE SEMESTER I 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK. 06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;

13. Perdirjen Kekayaan Negara PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
14. PMK No. 01/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya;
15. KMK RI No. 4/KMK.06/2014 perubahan atas Kepmenkeu No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat;
16. KMK No. 295/KMK.6/2019 tentang penggolongan masa manfaat dalam rangka penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat;
17. KMK RI No. 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya.
18. KMK RI No. 145/KM.6/2016 tentang Perubahan atas KMK RI No. 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya.

B. Entitas Pelaporan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten.

KPU Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.

KPU Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, serta koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota lain dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara ini berisi penjelasan mengenai Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER I 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Kodifikasi Barang Milik Negara

- Kodifikasi barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.
- Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab BMN.
- Sedangkan Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kodifikasi BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

B. Kapitalisasi Barang Milik Negara

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar penetapan kapitalisasi adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam SAP, Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP Nomor 9.

C. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan pada tingkat satuan kerja dan setiap semester tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, dan Pengguna Barang. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan antara UAKPB dan KPKNL, UAPPB-W dan Kantor Wilayah

DJKN, UAPPB-E1 dan UAPB dengan Kantor Pusat DJKN. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009.

D. Penyusutan Barang Milik Negara

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tujuan Penyusutan adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa : Gedung dan bangunan; Peralatan dan mesin; Jalan, irigasi, dan jaringan; dan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna SEMESTER I 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari laporan keuangan dan penyusunan laporan aset di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada SEMESTER I 2025 ini adalah sebesar Rp 2.875,510,950,00 (*Dua milyar*

delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan SEMESTER I 2025 sebesar Rp 2.875,510,950,00 (*Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), dan tidak terdapat nilai mutasi yang terjadi selama SEMESTER I 2025.

Nilai mutasi BMN berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
5. Laporan Penyusutan;
6. Laporan Barang Rusak Berat Yang Belum Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
7. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapan Statusnya (BPYBDS);
8. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
9. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAIBA-SIMAK

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I 2025

1. Saldo Awal Laporan Semester I 2025

Nilai BMN KPU Kabupaten Pekalongan Semester I 2025 adalah sebesar Rp 2.875,510,950,00 (*Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 2,572,361,450,00 (*Dua milyar limaratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.303,149,500,00 (*Tiga ratus tiga juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester I 2025

Mutasi BMN Semester I 2025 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 sebesar Rp 0

b. Tanah.

KPU Kabupaten Pekalongan tidak memiliki asset tetap berupa tanah.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp 2,572,361,450,00 (*Dua milyar limaratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*), jumlah tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp 2,401,551,450,00 (*Dua milyar empat ratus satu juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*), dan terdapat mutasi nilai penambahan Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 170,810,000,00 (*Seratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Terdapat reklasifikasi barang namun tidak mempengaruhi nilai peralatan dan mesin.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER I 2025 adalah sebesar Rp 1,103,922,000,00 (*Satu milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 19 unit dengan nilai sebesar Rp 933,112,000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah*). terdapat mutasi nilai penambahan Alat angkutan berupa 5 Sepeda motor sejumlah Rp 170,810,000,00 (*Seratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*)

Dari jumlah Alat Angkutan (3.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	19	1.103.922.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat		

2) Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang Kuasa Semester I 2025 adalah sebesar Rp 350.430.350,00 (*Tiga ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 166 buah dengan nilai Rp 350.430.350,00 (*Tiga ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	248	350.430.350
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

3) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06),

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp 53.715.000,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 8 unit dengan nilai sebesar Rp 53.715.000,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah barang, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	12	53.715.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

4) Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER I 2025 adalah sebesar Rp 1.047.352.200,- (*Satu milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 127 unit dengan nilai sebesar Rp 1.047.352.200,- (*Satu milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai.

Dari jumlah Alat Komputer (3.10) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	127	1.047.352.200
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat		

5) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Total Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp 1,914,304,992 (*Satu milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*), tidak terdapat mutasi pada Semester I 2025.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Gedung Bangunan (4.01)

Saldo Gedung Bangunan (4.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER I 2025 adalah sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	97.718.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Total Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER I 2025 adalah sebesar Rp 19.543.605.00 (*Sembilan belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah*).

No. Akun	Uraian	Saldo Tahun Anggaran 2025		
		Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
4,01	Bangunan dan Gedung	97.718.000	19.543.605	78.174.395

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna SEMESTER I 2025 adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*) berupa 1 unit Maket TPS. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit barang dengan nilai sebesar Rp 3.200.000,00 (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai pada Aset Tetap Lainnya.

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	3.200.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

f. Aset lain-lain

Saldo Aset lain - lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp0,00.

g. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Saldo awal Aset tetap yang tidak di gunakan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp. 202.231.500,00 (*Dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*). Penyusutan Aset tetap yang tidak di gunakan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp. 202.231.500,00 (*Dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*)

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebesar Rp 2.875.510.950.,00 (*Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), nilai BMN dimaksud

disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar	-	-	-	#DIV/0!	-	-
1	Persediaan	0	0,00%	0	#DIV/0!	-	0,00%
	Sub Jumlah (1)	-	0,00%	0	#DIV/0!	-	0,00%
II	Aset Tetap	2.844.662.050	1	-	#DIV/0!	2.642.330.550	1
1	Tanah	-	0,00%	0	#DIV/0!	-	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	2.541.412.550	89,34%	-	#DIV/0!	2.541.412.550	89,34%
3	Gedung dan Bangunan	97.718.000	3,44%	0	#DIV/0!	97.718.000	3,44%
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000	0,11%	0	#DIV/0!	3.200.000	0,11%
	Sub Jumlah (2)	2.642.330.550	92,78%	-	#DIV/0!	2.642.330.550	92,78%
III	Aset Lainnya	202.231.500	0	-	#DIV/0!	202.231.500	0
1	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	202.231.500	7,11%	0	#DIV/0!	202.231.500	7,11%
	Sub Jumlah (3)	202.231.500	7,11%	-	#DIV/0!	202.231.500	7,11%
	Total	2.844.562.050	100%	-	#DIV/0!	2.844.562.050	100%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut.

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	1.887.543.862	89,48%	26.761.130	100%	1.914.304.992	89,61%
2	Gedung dan Bangunan	19.643.000	0,93%	0	0	19.643.000	0,92%
	Sub Jumlah (I)	1.907.186.862	90%	26.761.130	100%	1.933.947.992	91%
II	Aset Lainnya						
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	202.231.500	10%	0	0%	202.231.500	9%
	Sub Jumlah (I)	202.231.500	10%	0%	0%	202.231.500	9%
	Total	2.109.418.362	100%	26.761.130	100%	2.136.179.492	100%

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.914.304.992	1.914.304.992	-
3	Gedung dan Bangunan	97.718.000	97.718.000	-
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000	3.200.000	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Laporan Tahunan TA 2024	2.673.852.050		6,38
2	Laporan Semester 1 TA 2025	2.844.562.050	170.710.000	6,38

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2025 adalah sebagai berikut :

b. Pengelolaan BMN *Idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Penanggungjawab UAKPB
Sekretaris

Bambang Yasmanto
NIP. 19691202 199703 1 003